

**LAPORAN DELEGASI DPR RI KE SIDANG UMUM KE-35
ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)**

14 - 20 SEPTEMBER 2014, VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI dalam Sidang Umum ke-35 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada tanggal 14 – 20 September 2014 di Vientiane Capital, Lao PDR didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 50/PIMP/I/2014 tanggal 8 September 2014

B. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-35 AIPA adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Yth. Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM | Wakil Ketua DPR RI bid. Korinbang/Ketua Delegasi |
| 2. Yth. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D | Wakil Ketua bid. Korekku/Wakil Ketua Delegasi |
| 3. Yth. Dr. KH. Surahman Hidayat, M.A | KetuaBKSAP/Anggota Delegasi/ F-PKS |
| 4. Yth. Sdr. H. Andi Anzhar CakraWijaya, S.H. | WakilKetua BKSAP/Anggota Delegasi/F-PAN |
| 5. Yth. Sdri. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si | Anggota Delegasi/F-PD |
| 6. Yth. Sdr. Jefirston R. Riwu Kore | Anggota Delegasi/F-PD |
| 7. Yth. Sdri. Hj. Tetty Kadi Bawono | Anggota Delegasi/F-PG |
| 8. Yth. Sdr. Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA | Anggota Delegasi/F-PG |
| 9. Yth. Sdri. Evita Nursanty | Anggota Delegasi/F-PDIP |
| 10. Yth. Sdr. Nazarudin Kiemas | Anggota Delegasi/F-PDIP |
| 11. Yth. Sdr. H. Iskan Qolba Lubis, M.A | Anggota Delegasi/F-PKS |
| 12. Yth. Sdr. Ir. Muhammad Najib, M.Sc | Anggota Delegasi/F-PAN |
| 13. Yth. Sdr. Drs. H. Otong Abdurrahman | Anggota Delegasi/F-PKB |
| 14. Yth.Sdri. Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati | Anggota Delegasi/
F-PHANURA |

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI

Maksud dan tujuan pengiriman Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-35 AIPA antara lain adalah dalam rangka memenuhi Tata Tertib DPR RI pasal 76 poin a yaitu membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain; serta pasal 77 poin c yaitu mengadakan kunjungan dan/atau menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atau penugasan atau persetujuan pimpinan DPR.

D. MISI DELEGASI

Adapun misi Delegasi DPR RI mengikuti Sidang-sidang tersebut, antara lain adalah:

1. Mendorong peran serta dari para anggota AIPA dalam upaya menyukseskan pembentukan ASEAN Community 2015 melalui penguatan peran AIPA di kawasan
2. Mempererat kerjasama regional antar negara di kawasan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN
3. Memperkuat peran *second-track diplomacy* Indonesia di tingkat regional dan internasional
4. Mendorong AIPA agar menghasilkan resolusi-resolusi yang implementatif dan solutif
5. Mendapatkan dukungan untuk kandidat Indonesia sebagai Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU)

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

a. Persiapan Materi

Materi yang dijadikan referensi bagi Delegasi DPR RI diolah oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli BKSAP yang disusun berdasarkan masukan yang komprehensif dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

b. Rapat Delegasi

Sebelum pelaksanaan Sidang Umum ke-35 AIPA, Delegasi DPR RI telah mengadakan rapat delegasi yaitu pada tanggal 2 September 2014 dengan mengundang Kementerian Luar Negeri untuk menerima masukan isu-isu terkait dan koordinasi persiapan materi Delegasi dalam setiap sesi persidangan. Pada rapat tersebut disepakati masukan dan poin-poin penting serta pembagian tugas Delegasi

dalam Sidang-sidang Komisi dan Dialog dengan Negara-negara Peninjau yang berlangsung secara paralel.

II. ISI LAPORAN

A. URAIAN TENTANG SITUASI UMUM PERSIDANGAN

Sidang Umum (SIUM) ke-35 AIPA telah diselenggarakan pada tanggal 15 – 20 September 2014 di Donchan Palace Hotel, Vientiane – Laos dengan tema *Strengthening Parliamentary Cooperation in the ASEAN Community Building*; dihadiri oleh 10 (sepuluh) Parlemen Anggota AIPA yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam; 8 (delapan) Parlemen Observers yaitu Australia, Belarus, India, Jepang, Federasi Rusia, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok dan Timor Leste. Sebagai *Guest of the Host*, hadir Deputy Sekretaris Jenderal ASEAN Sekretariat, Sdr. Mochtan Achmad Kurnia Prawira; wakil dari Mongolia, Jerman, *United Nations on the Prevention of Genocide* dan ASEAN WEN/FREELAND/ARREST, *Asia Pacific Forum on Women, Law and Development* (APWLD), dan *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNISDR). Sidang Pleno dipimpin oleh Presiden *National Assembly* Laos dan Presiden ke-35 AIPA, **H.E Mme. Pany YATHOTOU**.

Sidang Umum ke-35 AIPA terdiri rangkaian sidang sebagai berikut:

Pada tanggal 15 September telah dilaksanakan **Sidang Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)** pada pukul 09.00 dan **Sidang Executive Committee** pada pukul 20.00 LT. Sidang Executive Committee (EXCOM) dibuka dan dipimpin oleh Presiden AIPA dengan dihadiri oleh para Ketua Delegasi dan perwakilan anggota Delegasi dari setiap Parlemen Anggota AIPA. Pada Sidang EXCOM disepakati agenda-agenda Sidang AIPA ke-35 yang akan dibahas pada Sidang Komisi Politik, Ekonomi, Sosial, dan Organisasi.

Keesokan harinya, tanggal 16 September 2014 pukul 08.30 dilaksanakan **Courtesy Call** para Ketua Delegasi Anggota AIPA, Negara Peninjau, dan *Guest of the Host* dengan Presiden ke-35 AIPA, **H.E Mme. Pany YATHOUTOU**. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI, **Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM**, selaku Ketua Delegasi Indonesia hadir dalam acara tersebut.

Selanjutnya, pada pukul 09.00, dilaksanakan Inaugural Ceremony yang merupakan pembukaan Sidang Umum ke-35 AIPA secara resmi oleh Presiden ke-35 AIPA, **H.E Mme. Pany YATHOUTOU**. Dalam pidato pembukaannya, beliau menyampaikan bahwa kondisi politik dan keamanan di dunia menghadapi tantangan dengan adanya berbagai konflik di beberapa negara di Timur Tengah. Begitu pula krisis ekonomi dunia masih belum menuju kondisi stabil. Oleh karena itu, kerjasama antar negara baik di level pemerintah maupun legislatif harus terus ditingkatkan. Di kawasan Asia Tenggara

persiapan menuju ASEAN Community harus terus dilakukan terutama untuk menumbuhkan kesadaran di tingkat masyarakat. AIPA sebagai sebuah bentuk kerjasama antar parlemen di kawasan harus mampu memainkan perannya.

Pada kesempatan tersebut, Perdana Menteri Lao PDR, **H.E Mr. Thongsing THAMMAVONG**, juga menyampaikan sambutannya. Beliau menyatakan bahwa Sidang Umum ke-35 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang mengangkat tema “*Strengthening Parliamentary Cooperation in the Asian Community Building*” ini sejalan dengan kondisi terkini di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu Parlemen Laos mendukung seluruh draf resolusi yang diajukan demi mendukung langkah-langkah menuju terwujudnya ASEAN Community yang berlandaskan pada 3 pilar yakni, pilar ekonomi, politik dan sosial. Upaya membangun ASEAN Community merupakan sebuah proses panjang yang akan terus berlanjut jauh setelah 31 Desember 2015. AIPA dituntut untuk dapat berkontribusi aktif untuk turut mewujudkan hal tersebut.

Setelah Opening Ceremony, pada pukul 11.30 dilanjutkan dengan **Sidang Pleno Pertama** Sidang Umum ke-35 AIPA. Pada kesempatan tersebut, seluruh Ketua Delegasi AIPA, *Observers* dan *Guests of the Host* menyampaikan statement-nya, termasuk Delegasi Indonesia, yang pada saat itu dipimpin oleh **Yth. Sdr. Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM**.

Pada tanggal 17 September 2014, dilaksanakan Sidang-sidang Komisi dan Dialog with *Observers* secara paralel. **Sidang-sidang Politik, Ekonomi, Sosial, dan Organisasi** berlangsung pada pagi hari sedangkan **Dialog with Observers** berlangsung pada siang hingga sore hari.

Pada tanggal 18 September 2014 pukul 14.00, dilaksanakan **Sidang Joint Communique** yang membahas isi Joint Communique berupa inti sari hasil-hasil persidangan yang telah dilaksanakan.

Seluruh rangkaian persidangan AIPA berakhir pada **Sidang Pleno Kedua** yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2014 untuk mengesahkan laporan dan resolusi-resolusi yang dihasilkan *ExCom Meeting, Meeting of WAIPA, Committee Meetings on Political, Economic, Social and Organizational Matters* dan *Dialogue with Observers*. Sesi Pleno juga telah menyetujui *Joint Communiqué* yang telah disusun bersama oleh wakil-wakil anggota Parlemen AIPA pada tanggal 18 September 2013 dan ditandatangani oleh Ketua Delegasi masing-masing negara anggota AIPA.

Pada sesi Pleno kedua ini juga telah dilaksanakan serah terima jabatan Presiden AIPA dari Laos kepada Malaysia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Sidang Umum AIPA ke 36, yang diwakili oleh *Deputy Speaker of the House of Representatives of Malaysia*, **H.E. Datuk Seri Ronald Kiandee**, menerima mandat sebagai tuan rumah Sidang Umum ke-36 AIPA. Beliau menyampaikan bahwa dalam rangkaian Sidang Umum AIPA ke 36, para parlemen anggota AIPA telah memperat kerjasama dengan berbagai

pihak, termasuk dengan para perwakilan negara observer dan para *Guests of the Host* dan mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk dapat mengemban tugas yang akan datang. Dengan mengutip pernyataan Perdana Menteri Malaysia bahwa yang penting bukanlah ambisi untuk mewujudkan *ASEAN Community*, tetapi memastikan komunitas ini akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat ASEAN secara merata. Pada akhir sambutannya, beliau mengundang para delegasi untuk menghadiri Sidang Umum AIPA ke 36 di Kuala Lumpur pada tahun 2015 mendatang.

Seluruh rangkaian persidangan AIPA, ditutup oleh Presiden *35th AIPA General Assembly* dengan harapan bahwa melalui Sidang Umum ke-35 AIPA ini, berbagai hasil positif yang telah dihasilkan diantaranya adalah *Joint Communique* yang isinya merepresentasikan cita-cita AIPA, dapat memberikan kontribusi terhadap masa depan kawasan.

B. AGENDA SIDANG

Sidang Umum ke-35 AIPA membahas agenda-agenda item yang sudah disepakati pada Sidang *Executive Committee*, yaitu sebagai berikut:

A. Committee on Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) :

1. Strengthening Women Parliamentarians' roles in ASEAN Community building
2. Strengthening efforts in the prevention of all forms of discrimination and violence against women and children in ASEAN
3. Women Leadership in South East Asia (usulan Indonesia)

B. Committee on Political Matters :

1. Report of the AIPA-ASEAN Interface at the 24th ASEAN Summit
2. Resolution on the Adoption of the Report of the 6th Meeting of the AIPA Caucus
3. Parliamentary cooperation in the ASEAN Political-Security Community building

C. Committee on Economic Matters :

1. Fostering green growth towards sustainable development in ASEAN
2. Promoting the development of entrepreneurship skills in the process of narrowing development gaps in ASEAN

D. Committee on Social Matters :

1. Strengthening AIPA Member Parliamentary Co-operation in Preventing Pandemic/Infectious Diseases like Ebola Virus Disease
2. Enhancing Legislative Co-operation among AIPA Member Parliaments on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases

3. Strengthening Parliamentary Roles in Developing Vocational Education and Labor Skills for the ASEAN Labor Market's Integration
4. Report of the 11th Meeting of the AIFOCOM to Combat the Drug Menace and strengthening legal cooperation among parliaments in realizing a drug-free ASEAN
5. Resolution on the Formation of the AIFOCOM Technical Working Group

E. Committee on Organizational Matters :

1. Resolution on Amendments to the Agreement on the Establishment of an AIPA Secretariat
2. Resolution on Amendments to the Statute of AIPA
3. Resolution on Amendments to the Financial Rules of the AIPA Secretariat
4. Resolution on Amendments of the AIPA Staff Regulations of the AIPA Secretariat
5. Resolution on the Instruction Manual for Staff of the AIPA Secretariat
6. Resolution on Financial Reports of the AIPA Secretariat for 1 July 2013 to 30 September 2013, 1 October 2013 to 30 June 2014 and Estimated Expenditure for 1 July 2014 to 30 September 2014
7. Resolution on the Estimated Budget for the AIPA Secretariat for the Period 1 October 2014 to 30 September 2015, Supplementary Estimate from 1 August 2015 to 30 September 2015
8. Resolution on the adoption of the Work Plan 2014 of the AIPA Secretariat
9. Resolution on the Date of Appointment of the Secretary General
10. Resolution on the Salary Increment for the Secretary General
11. Resolution on the Establishment of AIPA National Parliamentary Group/Caucus to Combat Wildlife Crime
12. Resolution on the Date and Venue of the 36th General Assembly
13. Resolution on the Appreciation of the Services of Her Excellency Madam Pany YATHOTOU as the President of the 35th AIPA from September 2013 to September 2014.

F. Topic for Dialogue with AIPA Observer Countries:

New approaches for cooperation engagement between AIPA Member Parliaments and Parliaments of observer Countries

C. PARTISIPASI DELEGASI DPR RI

Delegasi DPR RI telah berpartisipasi aktif dalam setiap persidangan baik dalam Sidang-sidang Komisi, *Joint Communique* maupun dalam *Dialogue With Observers*.

Sidang WAIPA

Sidang *Women Parliamentarians of AIPA* (WAIPA) dipimpin oleh anggota parlemen Lao PDR, **Hon. Prof. Dr. Bounnong BOUPHA**, dan dihadiri oleh wakil-wakil parlemen negara-negara ASEAN yang menangani isu perempuan. Delegasi DPR RI diwakili oleh **Yth. Sdri. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf M.Si., Yth. Sdri. Hj. Tetty Kadi Bawono, Yth. Sdri. Evita Nursanty, dan Yth. Sdri. Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.**

Sidang membahas 3 (tiga) draft resolusi mengenai (1) *Strengthening efforts in Prevention of All Forms of Discrimination and Violence against Women and Children in ASEAN* yang menekankan perlunya fasilitas bagi korban kekerasan seperti *pre-hospital care* dan perawatan bagi korban kekerasan seksual, (2) *Strengthening Women Parliamentarians's Role in ASEAN Community Building* yang menggarisbawahi pentingnya peningkatan persentase wanita dalam badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif di ASEAN, dan (3) *Women Leadership in Southeast Asia* yang menyatakan pentingnya penambahan ruang bagi wanita di kawasan Asia Tenggara terutama jika dilihat dari tidak seimbangnya representasi wanita dengan jumlah populasi di level pimpinan.

Ketiga draft resolusi ini dibahas dalam rangka memajukan hak-hak perempuan di ASEAN, terutama dalam hal hak politik dan ekonomi. Dalam hal ini WAIPA berperan untuk memastikan komitmen dari seluruh anggota untuk selalu melindungi hak-hak wanita dan anak-anak serta mendorong peran wanita dalam pengambilan keputusan, terutama yang sangat terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka.

Delegasi DPR RI menyampaikan bahwa langkah nyata yang telah ditempuh oleh Pemerintah dalam hal ini terkait perlindungan wanita, ditunjukkan dengan partisipasi aktif Pemri dalam fora internasional seperti Komite Penghapusan segala bentuk Tindakan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Komite Hak Anak dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Sedangkan, dalam mendorong peran perempuan di parlemen, Indonesia telah mengembangkan kaukus perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam parlemen.

Sidang WAIPA menyetujui ketiga Draft Resolusi dan Report Sidang WAIPA untuk diadopsi pada Sidang Pleno Kedua.

Sidang Executive Committee

Delegasi DPR RI yang hadir pada Sidang ini yaitu **Yth. Dr. KH. Surahman Hidayat, MA, Yth. Sdr. H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, S.H., Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., dan Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA.** Delegasi menyampaikan 2 (dua) usulan agenda yaitu *Women Leadership in Southeast Asia* untuk Komisi WAIPA dan *the Adoption of National Action Plans to Implement the United Nations Guiding*

Principles on Business and Human Rights and Reaffirm State's Duty to Protect untuk Komisi Politik.

Untuk usulan Delegasi DPR RI mengenai "*The Adoption of National Action Plans to Implement the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and Reaffirm State's Duty to Protect*", Sidang Executive Committee menyatakan bahwa negara-negara anggota AIPA membutuhkan waktu untuk mempelajari *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and Reaffirm State's Duty to Protect* dan menyetujui resolusi ini untuk dibahas pada SIUM ke-36 AIPA di Kuala Lumpur.

Menanggapi hal tersebut, Delegasi DPR RI menyampaikan pandangan tentang pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam bidang bisnis, terutama dalam perlindungan pekerja. Selanjutnya, Delegasi Parlemen Laos menyampaikan bahwa memang penting untuk dapat mengadopsi resolusi ini ke dalam Rencana Aksi Nasional, namun mereka masih perlu untuk meninjau kembali, dan membahas mengenai rencana adopsi ini di dalam negeri karena mereka berpendapat bahwa tidak semua Negara ASEAN memiliki kapasitas nasional yang mencukupi dalam rangka penerapan resolusi dimaksud.

Pada agenda penambahan *other matters*, DelRI menambahkan satu agenda terkait dukungan/*endorsement* dari AIPA atas pencalonan Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si, sebagai Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) mengingat beliau merupakan satu-satunya calon dari negara anggota ASEAN. Menanggapi hal tersebut, Filipina, Kamboja, Thailand, dan Viet Nam secara terbuka menyampaikan dukungan atas pencalonan Dr. Nurhayati sebagai Presiden IPU periode 2014-2017. Dukungan tersebut diberikan atas dasar solidaritas ASEAN yang senantiasa memberikan dukungan atas berbagai pencalonan negara anggota ASEAN di berbagai organisasi internasional. Di akhir sidang, pimpinan sidang menyampaikan bahwa AIPA pada prinsipnya tidak memiliki keberatan dan siap untuk mendukung pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf sebagai Presiden IPU periode 2014-2017.

Sidang EXCOM menerima usulan Delegasi DPR RI untuk Komisi WAIPA dan mengadopsi *agenda items* SIUM ke-35 AIPA.

Sidang Pleno Pertama

Pada Sidang Pleno Pertama, Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, **Yth. Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM**, selaku Ketua Delegasi Indonesia, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada *National Assembly Lao PDR* sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA ke 35. Dalam kesempatan sidang pleno pertama, Ketua Delegasi DPR RI menyampaikan pidato yang utamanya menggarisbawahi tentang pentingnya semua pihak, termasuk para anggota parlemen AIPA, untuk ikut memastikan pembentukan Komunitas ASEAN pada Desember 2015. Hal ini sejalan dengan tema AIPA kali ini yaitu "*Strengthening Parliamentary Cooperation in the ASEAN*

Community Bulding". Anggota parlemen AIPA diharapkan dapat terus memegang komitmen dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk mendukung pembentukan Komunitas ASEAN 2015.

Beliau juga menyinggung tentang masalah politik dan keamanan, khususnya tentang ancaman-ancaman baru yang berlatar belakang radikalisme agama di masyarakat seperti IS yang walaupun bukan berasal dari kawasan Asia Tenggara tetapi memiliki potensi ancaman di ASEAN. Selain itu disampaikan pula mengenai keprihatinan Indonesia terkait penyebaran virus ebola, sebagai salah satu ancaman keamanan non-tradisional. Dalam hal ini Indonesia mengajak semua pihak di kawasan untuk memperkuat kerjasama untuk mengantisipasi kemungkinan penyebaran virus mematikan tersebut di kawasan Asia Tenggara.

Sidang Pleno Pertama ini telah menyetujui *Program of Activities of the 35th General Assembly* dan *Agenda Items for the 35th General Assembly*.

Sidang Komisi Politik

Pertemuan dipimpin oleh anggota *National Assembly* Laos, **Hon. Dr. Kukeo Akkhamontry**, dan dihadiri oleh wakil-wakil parlemen dari negara ASEAN. Delegasi RI diwakili oleh **Yth. Sdr. Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA, Yth. Sdr. Evita Nursanty, Yth. Sdr. Ir. Muhammad Najib, M.Sc** dan **Yth. Sdr. Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati**.

Sidang Komisi Politik membahas draft resolusi tentang *"Parliamentary Cooperation in the ASEAN Political-Security Community Building"*. Delegasi Laos menyampaikan bahwa draft resolusi menggarisbawahi peran AIPA dalam meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan agar masyarakat ASEAN hidup dalam dunia yang adil, demokratis dan harmonis sebagaimana disebutkan dalam Piagam ASEAN.

Dalam pembahasan di Sidang Komisi ini, para anggota parlemen AIPA pada umumnya menyepakati pentingnya komitmen dan dukungan penuh AIPA dalam mewujudkan APSC 2015. Para anggota parlemen AIPA juga menyadari bahwa meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk memperkuat kesatuan dan kekompakan dalam memperjuangkan kepentingan regional guna memelihara sentralitas ASEAN.

Selain memberikan pandangan umum, para anggota parlemen AIPA, termasuk Indonesia, juga memberikan dukungan atas usulan resolusi. Pada kesempatan ini, para anggota Komisi Politik menyetujui penambahan paragraf mengenai situasi Laut Tiongkok Selatan (LTS) dengan mengacu kepada *Chairman's Statement KTT ASEAN ke-24* di Myanmar, 11 Mei 2014.

Sidang Komisi Ekonomi

Sidang dipimpin oleh anggota *National Assembly* Laos, **Dr. Ms. Souvanpheng Boupphanouvong**, dan dihadiri oleh wakil-wakil parlemen dari negara-negara ASEAN. Adapun Delegasi RI diwakili oleh **Yth. Sdr. Jefirston R. Riwu Kore** dan **Yth. Sdr. Nazarudin Kiemas**.

Sidang Komisi Ekonomi membahas 2 (dua) draft resolusi mengenai “*Fostering Green Growth Development Strategy in ASEAN*” dan “*Promoting the Entrepreneurship Development in the Process of Narrowing Development Gap in ASEAN*”.

Usulan Draft Resolusi Fostering Green Growth Development Strategy in ASEAN sejalan dengan Resolusi SIUM ke-33 pada bulan September 2012 di Indonesia tentang “*the Creation of a Green Growth Economy to Promote Sustainable Development*”, serta Resolusi SIUM ke-34 AIPA pada bulan September 2013 di Brunei Darussalam tentang “*Fostering the Growth and Sustainable Development of SMEs.*” Draft resolusi ini menekankan pentingnya dukungan negara-negara anggota AIPA dalam mendukung *green growth* serta pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka menyambut Komunitas ASEAN 2015.

Sidang mencatat visi bersama ASEAN dalam mengatasi pengaruh negatif lingkungan global dan regional melalui perubahan arah pendekatan pertumbuhan ekonomi dari berdasarkan kuantitas menuju berdasarkan kualitas. Pertumbuhan ekonomi harus terkait dengan pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan, mengurangi pengaruh negatif *climate change*, memelihara kesuburan tanah, memastikan ketahanan pangan dan energi, serta kesinambungan lingkungan & *biodiversity*.

Semua delegasi pada prinsipnya mendukung draft resolusi dengan memberikan masukan mengenai perlunya dukungan parlemen bagi i) pengembangan strategi kebijakan *green growth* nasional; ii) peningkatan kerjasama regional untuk pengembangan energi terbarukan melalui pembentukan ASEAN *Green Growth Centre*; iii) pembentukan kebijakan dan *legal framework* untuk perlindungan dan manajemen sumber daya alam; iv) pemberian bantuan teknologi dan pengalaman ramah lingkungan kepada *CLMV countries*, serta; iv) peningkatan *knowledge sharing* antara negara-negara ASEAN dengan berbagai organisasi/lembaga internasional untuk pengembangan strategi *green growth*.

Pada pembahasan agenda *Promoting the Development of Entrepreneurship in the process of Narrowing the Development Gap in ASEAN*, anggota-anggota Komisi Ekonomi AIPA menyampaikan dukungan regional dalam mempersempit kesenjangan negara-negara ASEAN dalam menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA). Kewirausahaan merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, penguatan kemampuan para pengusaha ASEAN akan membantu mempersempit kesenjangan pembangunan dan menciptakan kemakmuran di ASEAN.

Komisi Ekonomi pada Sidang Umum AIPA ke-35 merekomendasikan bagi Negara-negara anggota AIPA untuk memastikan dukungan politik yang kuat untuk pendidikan kewirausahaan, mempertimbangkan pendanaan baru untuk memperkuat kemampuan pengusaha di negara-negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CMLV), dukungan pembangunan sistem pendidikan dengan kurikulum berbasis kewirausahaan, mendukung pengusaha muda, memprioritaskan dukungan terhadap peningkatan kewirausahaan melalui kemungkinan akses ke sumber keuangan dan mempertimbangkan pendirian *ASEAN SME Regional Development Fund* dan *ASEAN SMEs Service Center*.

Sidang Komisi Ekonomi menyetujui 2 (dua) Draft Resolusi tersebut untuk disampaikan dan diadopsi pada Sidang Pleno Kedua.

Sidang Komisi Sosial

Sidang Komisi Sosial dipimpin oleh anggota *National Assembly* Laos, **Prof. Dr. Phonetep Pholsena**, dan dihadiri oleh wakil-wakil parlemen dari negara ASEAN. Delegasi RI diwakili oleh **Yth. Sdr. Iskan Qolba Lubis** dan **Yth. Sdr. Otong Abdurrahman**.

Sidang Komisi Sosial kali ini membahas 3 (tiga) draft resolusi usulan Lao PDR mengenai (i) *Strengthening AIPA Member Parliamentary Co-operation in Preventing Pandemic/Infectious Diseases like Ebola Virus Disease*, (ii) *Enhancing Legislative Co-operation among AIPA Member Parliaments on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases*, dan (iii) *Strengthening Parliamentary Roles in Developing Vocational Education and Labor Skills for the ASEAN Labor Market's Integration*.

Pembahasan mengenai *Strengthening AIPA Member Parliamentary Co-operation in Preventing Pandemic/Infectious Diseases like Ebola Virus Disease*, menggarisbawahi tentang pentingnya peningkatan kepedulian di kawasan ASEAN terhadap *Ebola Virus Disease* yang menyerang berbagai kawasan di dunia. Kerjasama negara ASEAN diharapkan dapat mencegah penyebaran virus ebola ke kawasan Asia Tenggara dengan meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan di tiap batas wilayah negara ASEAN.

Dalam pembahasan *Enhancing Legislative Co-operation among AIPA Member Parliaments on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases*, anggota-anggota Sidang Komisi Sosial AIPA menggarisbawahi pentingnya peran AIPA dalam mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan *awareness* tentang gaya hidup tidak sehat yang merupakan salah satu penyebab *non-communicable disease*. Perlunya strategi bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya tembakau, alkohol dan gaya hidup tidak sehat yang berujung kepada penyakit-penyakit berbahaya yang dapat berakibat fatal.

Selanjutnya, dalam pembahasan *Strengthening Parliamentary Roles in Developing Vocational Education and Labor Skills for the ASEAN Labor Market's Integration*, anggota Komisi Sosial AIPA menggarisbawahi bahwa pendidikan kejuruan adalah salah satu faktor penting untuk menghasilkan *skilled labour* menjelang Komunitas ASEAN 2015. Integrasi *ASEAN Labour Market* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Komunitas Ekonomi ASEAN. *Skilled labour* akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk bersaing di tingkat regional.

Selain 3 (tiga) draft resolusi tersebut diatas, Komisi Sosial juga menerima *Report of the 11th AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat Drug Menace* dan akan diajukan untuk mendapatkan pengesahan pada pleno ke-2.

Terkait pembahasan tentang pembentukan Technical Working Group untuk AIFOCOM, Komite Sosial menyepakati untuk melanjutkan pembahasan di Pertemuan ke-36 AIPA di Malaysia tahun depan. Keputusan tersebut diambil karena Malaysia ingin merubah posisi yang disampaikan pada pertemuan ke-34 AIPA di Brunei Darussalam yang lalu dimana pada pertemuan yang lalu Malaysia berkomitmen untuk menanggung segala biaya yang terkait dengan *hosting of TWG*.

Sidang Komisi Organisasi

Sidang dipimpin oleh **Hon.Prof. Davone VANGVICHITH**, anggota *National Assembly of Lao PDR*, dan dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA. Delegasi DPR RI diwakili oleh **Yth. Sdri. Hj. Tetty Kadi Bawono**.

Sidang membahas berbagai isu organisasi, seperti anggaran, amandemen Statuta AIPA terkait perubahan istilah *Member Countries* menjadi *Member States* dan usulan pembentukan contingency fund. Sidang menyetujui perubahan istilah menjadi *Member States*, menghilangkan istilah *Special Observer*, dan menolak pembentukan *contingency fund*. Adapun topik yang menjadi perhatian adalah usulan kenaikan gaji Sekjen AIPA. Sidang menyetujui kenaikan gaji sesuai besaran yang diusulkan karena masih dianggap dalam batas kewajaran sesuai besaran gaji pejabat setingkat di organisasi regional lainnya.

Malaysia menyambut baik penunjukannya sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-36 yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 06-12 September 2015.

Sidang juga memutuskan untuk menunda pembahasan mengenai *Establishment of AIPA National Parliamentary Group/Caucus to Combat Wildlife Crime* pada SIUM selanjutnya di Malaysia.

Sidang Komisi Organisasi menyetujui 13 (tiga belas belas) Draft Resolusi untuk disampaikan dan diadopsi pada Sidang Pleno Kedua.

DIALOGUE WITH OBSERVERS

Pada sesi dialog dengan negara-negara Peninjau, setiap Anggota Delegasi DPR RI berpartisipasi aktif dan menyampaikan kepentingan Indonesia dalam pertemuan yang dilaksanakan secara paralel. Secara umum, dialog terpusat pada peningkatan kerjasama antara negara-negara anggota AIPA dengan negara-negara peninjau dalam bidang perdagangan, investasi, pertanian, teknologi pertanian, pariwisata dan pendidikan.

Australia

Pertemuan dipimpin oleh *Chairperson of the Economic Planning and Finance Committee, National Assembly Laos*, **Hon. Dr. Souvanpheng Boupphanouvong**, dan dihadiri oleh wakil-wakil parlemen dari negara-negara ASEAN dan perwakilan Parlemen Australia yang dipimpin oleh **Hon. Dr. Dennis Jensen**. Selain itu, hadir pula **H.E. Mme. Bronwyn Bishop**, *Speaker of the House of Representatives Australia*, dan **Hon. Mr. Graham Perett**. Adapun Delegasi DPR RI diwakili oleh **Yth. Sdr. Muhammad Oheo Sinapoy S.E., MBA** dan **Yth. Sdr. Jefirston R. Riwu Kore**.

Perwakilan AIPA mengutarakan apresiasi mereka kepada Australia atas bantuan Australia selama ini, terutama di bidang pendidikan dengan terus meningkatnya beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Australia.

Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Australia adalah "*the closest western neighbor of Indonesia*", dan juga ASEAN, karena itu penting untuk membina hubungan baik dan meningkatkan kerjasama yang sudah ada. Pertemuan juga mencatat perlunya bertukar pengalaman dan ilmu untuk belajar *best practices* di ASEAN dan Australia. Australia menyambut baik kunjungan wakil parlemen ASEAN ke Australia dan sebaliknya.

Australia dan wakil parlemen ASEAN menyambut baik implementasi Colombo Plan yang akan membuka kesempatan bagi pemuda Australia untuk belajar di negara ASEAN. Jadi tidak hanya pemuda ASEAN yang datang ke Australia untuk melanjutkan studi mereka.

Belarus

Pertemuan dipimpin oleh anggota *National Assembly Lao PDR*, **Hon. Mr. Kisinin Sinphanngam**, serta dihadiri oleh wakil-wakil parlemen dari negara-negara ASEAN dan perwakilan Parlemen Belarus yang dipimpin oleh **Hon. Mr. Vitaly Busko** didampingi oleh **Hon. Mr. Andrei Yakovlev**. Adapun Delegasi RI diwakili oleh **Yth. Sdr. Nazarudin Kiemas** dan **Yth. Sdr. Tetty Kadi Bawono**.

Pertemuan mencatat perkembangan hubungan antara ASEAN dan Belarus yang sudah terjalin sejak tahun 1990, ditandai antara lain dengan meningkatnya saling kunjung

antara pejabat pemerintah dan parlemen. Berbagai kerjasama yang telah terjalin dengan negara-negara ASEAN menjadi fondasi yang kuat untuk menjalin kerjasama bilateral dengan masing-masing negara anggota. Parlemen Belarus menegaskan kembali kesiapannya dalam menjalin kerjasama di berbagai sektor dengan negara-negara anggota AIPA.

Delegasi RI menyampaikan harapannya agar kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan Belarus dapat terus berlanjut seiring dengan pergantian pemerintahan dan anggota parlemen di Indonesia. Selain itu, disampaikan pula bahwa kedua negara dapat menjadi penghubung bagi masing-masing kawasannya dalam rangka meningkatkan kerjasama regional. Indonesia juga menyampaikan kesempatan berinvestasi yang luas di Indonesia melalui program *Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI)*. Selain itu, kedua negara senantiasa sepakat agar mengutamakan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan berbagai sengketa internasional. Indonesia juga menyambut baik rencana kunjungan Parlemen Belarus ke Indonesia.

Pertemuan menyepakati pentingnya mempromosikan investasi Belarusia di negara-negara ASEAN. Pada kesempatan ini, pihak Belarus berterima kasih atas berbagai kerjasama yang telah terjalin dengan negara-negara anggota AIPA dan berjanji akan menindaklanjuti berbagai rencana kunjungan kenegaraan.

India

Pertemuan dipimpin oleh anggota *National Assembly* Lao PDR, **Hon. Prof. Dr. Phonethep Pholsena**, dan dihadiri oleh wakil-wakil negara anggota AIPA dan perwakilan India, **H.E. Mr. Rajen Gohain**, didampingi oleh **Hon. Mr. Ganesh Singh** dan **Mr. V. R Ramesh**. Pada dialog tersebut, Delegasi RI diwakili oleh **Yth. Sdr. Otong Abdurrahman** dan **Yth. Sdr. Iskan Qolba Lubis**.

Pertemuan mencatat perkembangan hubungan antara negara anggota ASEAN dengan India. Dan menekankan kerjasama dalam bidang pengembangan energi terbarukan, pangan, kehutanan, *capacity building*, khususnya dalam pembelajaran Bahasa Inggris dan sebagainya.

India mengharapkan hubungan ASEAN – India maupun hubungan bilateral India dengan negara-negara di ASEAN dapat terus ditingkatkan.

Jepang

Pertemuan dipimpin oleh Anggota *National Assembly* Lao PDR, **Hon. Prof. Dr. Phonethep Pholsena**, serta dihadiri oleh wakil-wakil negara anggota AIPA dan perwakilan Jepang yang dipimpin oleh **Hon. Mr. Shimpei Matsushita**, didampingi oleh **Hon. Mr. Toshio Ishigami** dan **Hon. Mr. Kozo Akino**. Pertemuan dihadiri oleh

wakil-wakil parlemen dari negara ASEAN. Adapun Delegasi RI diwakili oleh **Yth. Sdr. Nazarudin Kiemas** dan **Yth. Sdr. Otong Abdurahman**.

Di awal pertemuan, Parlemen Jepang menyampaikan bahwa pertemuan Dialog antara Jepang dan AIPA sangat penting, khususnya bagi Jepang dalam menetapkan kebijakan terhadap negara ASEAN, terutama dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015.

Negara negara ASEAN menyampaikan penghargaan terhadap Jepang sebagai mitra utama ASEAN dalam berbagai sektor, seperti bantuan pembangunan, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Jepang diharapkan dapat terus mendukung negara-negara ASEAN dalam hal bantuan teknis, *capacity building*, *transfer of technology*, khususnya dalam hal penanganan bencana alam, seperti gempa bumi, taifun, tsunami dan sebagainya.

Menanggapi berbagai masukan, Pihak Jepang menegaskan kembali komitmennya dalam hubungan dengan ASEAN maupun dengan masing-masing negara dalam kerangka bilateral, termasuk dukungan Jepang dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di ASEAN melalui pendidikan.

Republik Korea

Pertemuan dipimpin oleh anggota *National Assembly* Lao PDR, **Hon. Prof. Dr. Bounnong Boupna**, serta dihadiri oleh wakil-wakil parlemen dari negara-negara ASEAN dan perwakilan Parlemen Republik Korea yang dipimpin oleh **Hon. Mr. Kim Jong Rok**, didampingi oleh **Hon. Mr. Lee Sang Il**, dan **Hon. Mr. Lim Su Kyung**. Adapun Delegasi RI diwakili oleh **Yth. Sdr. Ir. Tetty Kadi Bawono** dan **Yth. Sdr. Ir. Muhammad Najib, M.Sc .**

Di awal pertemuan, Parlemen Korea Selatan menyampaikan pentingnya hubungan antara Korea Selatan dengan ASEAN, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam kaitan ini, Parlemen Korea Selatan memandang bahwa pembentukan Komunitas ASEAN 2015 sudah berada dijalur yang benar, serta meminta dukungan negara-negara anggota AIPA dalam usaha unifikasi Semenanjung Korea.

Negara negara ASEAN menyampaikan penghargaan terhadap Korea Selatan sebagai mitra utama ASEAN dalam berbagai sektor, seperti bantuan pembangunan, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Hubungan ASEAN – Korea Selatan sudah berlangsung sejak tahun 1989 dan merupakan fondasi yang kuat untuk meningkatkan hubungan yang sudah berjalan dengan baik dan produktif ini, khususnya melalui *ASEAN – Republic of Korea Strategic Partnership*. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN juga mengharapkan adanya kerjasama dalam bidang *information and communication technology* (ICT) dengan Korea Selatan.

Delegasi RI menyampaikan pentingnya meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota AIPA dan Parlemen Korea Selatan. Diharapkan Korea Selatan dapat meningkatkan kerjasama di bidang *capacity building* dengan negara-negara ASEAN. Diharapkan pula Korea Selatan dapat mendukung *technology sharing* dan kerjasama penelitian dengan negara-negara ASEAN, khususnya di bidang peningkatan produktivitas pangan dan energi terbarukan. Indonesia juga berharap agar hubungan yang telah terjalin dengan baik dapat terus berlangsung dengan pemerintahan baru dan parlemen baru Indonesia. Selain itu, Indonesia meminta dukungan Korea Selatan dalam pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf sebagai ketua IPU.

Menanggapi berbagai masukan, Pihak Korea Selatan menegaskan kembali komitmennya dalam hubungan dengan ASEAN maupun dengan masing-masing negara dalam kerangka bilateral. Secara khusus, Parlemen Korea Selatan menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia serta meningkatkan volume perdagangan diantara kedua negara.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Pertemuan dipimpin oleh anggota *National Assembly* Lao PDR, **Hon. Dr. Kukeo Akkhamountry**, serta dihadiri oleh wakil-wakil negara anggota AIPA dan perwakilan RRT yang dipimpin oleh **H.E.. Mr. Chi Wan Chun**, didampingi oleh **Hon. Mr. Fu Shuang Jian**. Adapun Delegasi RI diwakili oleh **Yth. Sdri. Evita Nursanty** dan **Yth. Sdri. Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati**.

Dalam sambutan pembukaannya, Parlemen RRT menyampaikan bahwa berdasarkan sejarah telah terjalinnya hubungan baik antara RRT dengan negara-negara di kawasan. Meskipun tidak dapat diabaikan bahwa ada persoalan yang terjadi seperti misalnya persoalan klaim wilayah, namun hendaknya dicari apa yang menjadi *common ground* sehingga hubungan dapat dijalin lebih baik lagi. RRT berkeyakinan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan klaim wilayah harus dilakukan melalui dialog dan perundingan bilateral.

Ke-10 negara anggota AIPA peserta menyatakan penghargaan atas kerjasama yang baik antara ASEAN dan RRT. Beberapa negara secara individual juga menyampaikan perlunya keseimbangan perdagangan dengan RRT, mengundang RRT untuk berinvestasi di negara dan mengharapkan peningkatan kunjungan wisatawan RRT ke negaranya.

Federasi Rusia

Pertemuan dipimpin oleh anggota *National Assembly* Lao PDR, **Prof. Dr. Bounngong Boupha**, dan dihadiri oleh wakil-wakil negara anggota AIPA serta delegasi Rusia yang dipimpin oleh **Hon. Mr. Arnold Tulokhonov**, didampingi oleh **Hon. Mr. Stepan**

Zhiryakov, dan **Hon. Mr. Oleg Kazakovsten**. Adapun Delegasi RI diwakili oleh **Yth. Sdr. Muhammad Oheo Sinapoy S.E., MBA** dan **Yth. Sdr. Jefirston Riwu Kore**.

Dalam sambutannya, Delegasi Rusia menyampaikan ketertarikannya menjadi pengamat AIPA, karena ingin memperluas konektivitas dengan kawasan Asia Tenggara. Dua pertiga wilayah Rusia berada di Asia dan untuk itu Rusia sangat memperhatikan perkembangan di Asia, termasuk di Asia Tenggara. Rusia ingin agar kerjasama di bidang energi dengan ASEAN dapat ditingkatkan lagi di masa mendatang.

Kerjasama industri pertahanan dan alih teknologi dimungkinkan dengan dasar yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai contoh, kerjasama kerdigantaraan yang mencakup transfer teknologi sangat memungkinkan melalui kolaborasi antara Sukhoi dengan industri penerbangan di Indonesia. Lebih lanjut lagi Rusia mengapresiasi Indonesia yang telah menjadi pengguna beberapa pesawat tempur dan helikopter buatan Rusia.

Timor Leste

Pertemuan dipimpin oleh anggota *National Assembly* Lao PDR, **Assoc. Prof. Dr. Somock Kingsada**, dan dihadiri oleh wakil-wakil negara anggota AIPA dan Parlemen Timor Leste yang dipimpin oleh **H.E. Mr. Vicente da Silva Guterres**, didampingi oleh **Hon. Mr. Duarte Nunes**. Adapun Delegasi RI diwakili oleh **Yth. Sdri. Evita Nursanty** dan **Yth. Sdri. Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati**.

Dalam sambutan pembukaannya, Parlemen Timor Leste menyampaikan penghargaannya kepada Laos, selaku ketua AIPA tahun 2014 khususnya, dan anggota Parlemen AIPA pada umumnya, dimana tahun ini adalah ke-2 kalinya Timor Leste hadir sebagai *observer* AIPA. Dalam kaitannya sebagai *observer* AIPA, Timor Leste berkomitmen untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam organisasi parlemen ini serta berkontribusi pada upaya pembangunan Komunitas ASEAN 2015. Parlemen Timor Leste juga menyampaikan bahwa saat ini Timor Leste tengah berupaya meningkatkan keamanan dan stabilitas serta menumbuhkan ekonomi negaranya.

Parlemen ASEAN pada umumnya memberikan selamat kepada Timor Leste sebagai *observer* AIPA dan menyampaikan komitmen dan kesiapan mereka untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama dengan Timor Leste, baik dalam kerangka AIPA, bilateral maupun multilateral. Sebagian Parlemen ASEAN, seperti Myanmar, Thailand dan Vietnam, juga menyampaikan dukungan mereka pada upaya Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Terkait pengembangan kerjasama, baik dari pihak Timor Leste maupun ASEAN memfokuskan, antara lain, pada bidang pengolahan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan kapasitas.

SIDANG JOINT COMMUNIQUE

Sidang Joint Communique dipimpin oleh anggota *National Assembly* Lao PDR, **Hon. Prof. Dr. Bounnong Boupha**, serta dihadiri oleh wakil-wakil parlemen anggota AIPA. Delegasi RI diwakili oleh **Yth. Sdr. Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA** dan **Yth. Sdr. Jefirstson R. Riwu Kore**.

Selain memberikan *highlight* pidato Ketua Delegasi RI, Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM, yang disampaikan pada Sidang Pleno Pertama, Delegasi Indonesia juga aktif memberikan usulan amandemen terhadap Draft *Joint Communique*. DelRI menyampaikan tanggapan atas usulan Viet Nam yang ingin memasukkan paragraf mengenai Laut Tiongkok Selatan secara utuh sebagaimana dimuat dalam resolusi komite Politik. Setelah terjadi perdebatan akhirnya disepakati bahwa butir *political matters* pada *Joint Communiqué* merujuk pada *Report of the AIPA-ASEAN* pada KTT ke-24 di Myanmar, 11 Mei 2014.

Pada agenda Other Matters, DelRI menyampaikan usulan untuk mempertimbangkan pembahasan kenaikan gaji staf-staf Sekretariat AIPA pada Sidang Umum AIPA tahun depan karena tahun ini Komisi Organisasi telah menyetujui kenaikan gaji Sekjen AIPA.

LAIN-LAIN

Meeting with ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)

Di sela-sela Sidang, Delegasi RI mengadakan pertemuan dengan ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR). Pertemuan berlangsung di Donchan Palace Hotel pada tanggal 16 September 2014 pukul 12.00. Pertemuan ini merupakan inisiatif APHR dan telah dikomunikasikan kepada delegasi beberapa waktu sebelum pelaksanaan sidang. Delegasi DPR RI diwakili oleh **Yth. Sdr. Muhammad Oheo Sinapoy, S.E., MBA**, **Yth. Sdr. Ir. Muhammad Najib, M.Sc**, dan **Yth. Sdr. Dr. H. Otong Abdurrahman**. Adapun Delegasi APHR yang hadir yaitu **Hon. Mr. U Shwe Maung**, Ketua APHR Myanmar Caucus; **Hon. Mr. Son Chhay**, Ketua APHR Cambodia Caucus; dan **Hon. Mr. Charles Santiago**, Ketua APHR Malaysia Caucus.

Tujuan APHR meminta pertemuan dengan delegasi DPR RI adalah untuk diseminasi informasi mengenai APHR. Dalam pertemuan itu, delegasi APHR memperkenalkan organisasi mereka sebagai aliansi anggota parlemen peduli Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan Asia Tenggara yang terbentuk pada tahun 2013. APHR merupakan pengembangan Kaukus Myanmar yang semula hanya berkonsentrasi pada perjuangan anggota menegakkan HAM di Myanmar. Menyikapi visi pembentukan Komunitas ASEAN 2015, Kaukus Myanmar kemudian memperluas lingkup kerja menjadi regional.

Selain mengadakan pertemuan bilateral, APHR menyampaikan pula tujuan mereka di Lao PDR untuk melakukan *fact-finding mission* dan *follow up* investigasi menghilangnya Sombath Somphone salah satu aktivis dan tokoh masyarakat sipil di Lao PDR.

Penggalangan Dukungan Pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf sebagai Presiden IPU Periode 2014-2017

Sebagaimana diketahui, Indonesia mencalonkan Dr. Nurhayati Ali Assegaf sebagai Presiden *Inter-Parliamentary Union* (IPU) periode 2014-2017, yang pemilihannya akan diselenggarakan pada Pertemuan *Governing Council* IPU ke-195 di Jenewa pada tanggal 16 Oktober 2014. Sehubungan dengan hal tersebut, Delegasi RI memanfaatkan Sidang Majelis Umum AIPA ke-35 untuk menggalang dukungan negara-negara anggota AIPA dan *observer* AIPA terhadap pencalonan tersebut. Sebagai informasi, Dr. Nurhayati Ali Assegaf sendiri turut hadir dalam Sidang AIPA dan melakukan penggalangan dukungan.

Penggalangan dukungan pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menyampaikan permintaan dukungan secara terbuka pada saat penyampaian *statement* di pertemuan WAIPA dan pada saat sesi pleno pertama.

Selain itu, penggalangan dukungan pencalonan Dr. Nurhayati juga dilakukan pada saat sidang *Executive Committee* AIPA yang diselenggarakan pada tanggal 15 September 2014. Pada mata agenda penambahan *other matters*, Delri menambahkan satu agenda terkait dukungan/*endorsement* dari AIPA atas pencalonan Dr. Nurhayati tersebut, mengingat Dr. Nurhayati merupakan satu-satunya calon dari negara anggota ASEAN. Menanggapi hal tersebut, Filipina, Kamboja, Thailand, dan Viet Nam secara terbuka menyampaikan dukungan atas pencalonan Dr. Nurhayati sebagai Presiden IPU periode 2014-2017. Dukungan tersebut diberikan atas dasar solidaritas ASEAN yang senantiasa memberikan dukungan atas berbagai pencalonan negara anggota ASEAN di berbagai organisasi internasional. Di akhir sidang, pimpinan sidang menyampaikan bahwa AIPA pada prinsipnya tidak memiliki keberatan dan siap untuk mendukung pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf sebagai Presiden IPU periode 2014-2017.

Selanjutnya, Dr. Nurhayati juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Ketua Delegasi negara observer AIPA, yaitu India, Republik Korea, dan Jepang. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Dr. Nurhayati menyampaikan bahwa sudah saatnya IPU dipimpin oleh Presiden perempuan yang mengerti dan memiliki berbagai pengalaman dalam bekerja di IPU. Delegasi India, Korea, dan Jepang umumnya menyambut baik pencalonan Dr. Nurhayati tersebut dan berjanji akan berkoordinasi dengan Ketua Parlemen masing-masing untuk memutuskan posisi atas pemilihan Presiden IPU.

D. HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Setelah melakukan pembahasan terhadap agenda sebagaimana tersebut di atas melalui sidang-sidang dengan perdebatan yang cukup hangat dan panjang, Sidang Umum ke-35 AIPA di Vientiane Capital, Lao PDR, telah menghasilkan 7 (tujuh) *Report Sidang* yaitu: *Report of the Committee of Political Matters*; *Report of Committee on Economic Matters*; *Report of Committee on Social Matters*; *Report of Committee on Organizational Matters*; *Report of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)*; *Report of Committee on Joint Communiqué*; dan *Report of Committee on Dialogue with Observers*; serta menghasilkan *Joint Communiqué* dan 10 (sepuluh) Resolusi, yang 1 (satu) diantaranya merupakan usulan Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas, secara singkat disampaikan hasil-hasil Sidang Umum ke-35 AIPA yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang disahkan dalam Pleno Kedua sebagai berikut:

Political Matters :

1. *The Adoption of the Report of the Sixth AIPA Caucus in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 18-19 June 2014 (Res. 35GA/2014/POL/01)*
 - Para anggota parlemen AIPA menyepakati hasil sidang *the Sixth AIPA Caucus* yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 18-19 Juni 2014;
 - Para anggota parlemen AIPA mengapresiasi Brunei Darussalam yang telah sukses menyelenggarakan sidang *the Sixth AIPA Caucus* yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 18-19 Juni 2014;
 - Para anggota parlemen AIPA mengakui bahwa agenda topik mengenai “*The Cooperation on Higher Education (HE) and Technical and Vocational Education & Training (TVET) amongst the ASEAN Member States*” telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan untuk itu kerjasama terkait hal tersebut akan terus ditingkatkan dengan menyusun legislasi yang menunjang pengembangan yang lebih jauh.
2. *Parliamentary Cooperation in the ASEAN Political-Security Community (Res. 35GA/2014/POL/02)*
 - Para anggota parlemen AIPA mendukung peningkatan kerjasama politik dan keamanan diantara negara-negara anggota ASEAN demi mewujudkan ASEAN Political Security Community; sebagai Komunitas Politik Keamanan yang bertujuan menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Isu-isu keamanan regional saat ini semakin luas, sehingga dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi aktif dari seluruh negara di kawasan dalam menyelesaikan berbagai tantangan. Oleh karena itu parlemen anggota AIPA menyerukan kepada badan-badan sektoral ASEAN untuk segera mengimplementasikan action lines APSC

Blueprint sebagai mekanisme fundamental menuju tercapainya ASEAN Political Security Community;

- Dalam menyikapi situasi di Laut Tiongkok Selatan (LTS), parlemen anggota AIPA menyerukan pihak-pihak yang terlibat untuk tetap berpegang pada penyelesaian damai dengan mengacu kepada *Chairman's Statement* KTT ASEAN ke-24 di Myanmar, 11 Mei 2014.

Economic Matters:

1. *Fostering Green Growth Development Strategy in ASEAN (Res. 35GA/2014/ECO/01)*

- Para anggota parlemen AIPA menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Upaya-upaya yang dapat dikembangkan antara lain melalui penetapan kebijakan dan kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi kualitatif, inklusi sosial, pengurangan emisi karbon, teknologi bersih dan hijau, serta menghidupkan kebijakan-kebijakan sektoral dalam bidang energi, infrastruktur dan keuangan;
- Selain itu anggota parlemen AIPA mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerjasama regional di bidang energi baru dan terbarukan antara lain melalui pembentukan *ASEAN Green Growth Centre*, pelestarian hutan, dan pembangunan ramah lingkungan. Selain kerjasama, *knowledge sharing* diantara negara-negara anggota ASEAN juga harus intensif terutama dengan adanya pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015.

2. *Promoting the Development of Entrepreneurship in the Process of Narrowing Development Gap in ASEAN (Res. 35GA/2014/ECO/02)*

- Parlemen anggota AIPA menyadari bahwa transformasi struktur ekonomi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tantangan terbesar ASEAN saat ini. Dalam menyikapi tantangan tersebut dan mendukung negara-negara anggota ASEAN untuk mengambil manfaat secara maksimal dari perjanjian ASEAN Free Trade Area, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci penting terutama pengembangan kapasitas dan kapabilitas kewirausahaan;
- Parlemen anggota AIPA merekomendasikan Anggota ASEAN untuk memastikan dukungan politik yang kuat untuk pendidikan kewirausahaan, mempertimbangkan pendanaan baru untuk memperkuat kemampuan pengusaha di negara-negara Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam (CMLV), dukungan pembangunan sistem pendidikan dengan kurikulum berbasis

kewirausahaan, mendukung pengusaha muda, memprioritaskan dukungan terhadap peningkatan kewirausahaan melalui kemungkinan akses ke sumber keuangan;

- Memberikan prioritas bagi pengembangan kewirausahaan di kalangan perempuan juga menjadi salah satu titik berat resolusi ini. Dukungan diberikan dengan mendorong program-program pelatihan yang sensitif jender, memperluas akses pendanaan dan pemberdayaan perempuan di kawasan.

Social Matters:

1. *Strengthening AIPA Member Parliamentary Co-operation in Preventing Pandemic/Infectious Diseases like Ebola Virus Disease (Res. 35GA/2014/SOC/01)*

- Para anggota parlemen AIPA menyerukan kerjasama dalam mengidentifikasi aturan-aturan hukum, strategi-strategi dan rencana aksi regional yang dapat mencegah dan mengontrol kemungkinan penyebaran virus ebola. Selain itu, penguatan peran pengawasan parlemen dalam memperkuat pencegahan dan control penyebaran virus ebola termasuk penyebaran lintas batas;
- Selain itu, diserukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk mengaktifkan manajemen mekanisme bencana alam/darurat, dan membentuk pusat operasi darurat untuk mengkoordinasikan upaya-upaya penanggulangan diantara semua pihak terkait, dan menjamin implementasi dan pengawasan penanggulangan penyebaran virus ebola yang efektif dan efisien.

2. *Enhancing Legislative Co-operation among AIPA Member Parliaments on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (Res. 35GA/2014/SOC/02)*

- Para anggota parlemen AIPA mendukung penguatan strategi dan rencana aksi pemerintah di negara-negara anggota ASEAN untuk pencegahan dan kontrol *Non-Communicable Diseases (NCDs)*, terutama melalui edukasi masyarakat, berbagi pengalaman, *codes of conduct*, aksi bersama dan response terhadap ancaman yang muncul. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN selayaknya mempertimbangkan kemungkinan pembentukan skema multisektoral bagi pencegahan dan kontrol NCDs, dan mengkoordinasikan *mutual assistance* dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan;
- Selain itu, diserukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kesadaran dan mempertinggi health literacy diantara masyarakat ASEAN, dan menciptakan suasana kondusif yang memungkinkan gaya hidup sehat menjadi mudah diakses, terjangkau dan berkelanjutan.

3. *Strengthening Parliamentary Roles in Developing Vocational Education and Skilled Labor for the Integration of ASEAN Labor Market (Res. 35GA/2014/SOC/03)*

- Dalam menyongsong perwujudan Komunitas ASEAN 2015, para anggota AIPA menyadari bahwa pendidikan kejuruan adalah salah satu faktor penting untuk menghasilkan *skilled labour*. Integrasi *ASEAN Labour Market* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Komunitas Ekonomi ASEAN. *Skilled labour* akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk bersaing di tingkat regional;
- Diserukan pula penguatan kerja sama strategis diantara negara-negara anggota ASEAN dan kolaborasi dengan *Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)* bagi pengembangan kurikulum pendidikan yang mengacu pada kebutuhan pasar tenaga kerja.

WAIPA:

1. *Strengthening Efforts in the Prevention of All Forms of Discrimination and Violence Against Women and Children in ASEAN (Res. 35GA/2014/WAIPA/01)*

- Para anggota WAIPA menghimbau negara-negara anggota AIPA untuk memformulasikan dan mengesahkan Undang-undang yang menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara teknis, para anggota WAIPA menekankan perlunya fasilitas bagi korban kekerasan seperti *pre-hospital care* dan perawatan bagi korban kekerasan seksual di ASEAN;
- Selain itu ditekankan pula perlindungan bagi anak-anak dan perempuan, dan memperkecil kemungkinan anak-anak dan perempuan terpapar kekerasan baik domestik maupun di masyarakat. Negara-negara anggota ASEAN dihimbau pula untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan jasa hukum bagi perempuan dan anak-anak.

2. *Strengthening Women Parliamentarians Roles in ASEAN Community building (Res. 35GA/2014/WAIPA/02)*

- Menyadari peran strategis anggota parlemen perempuan dalam pembentukan Komunitas ASEAN, WAIPA mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan jumlah perempuan di posisi pengambil keputusan di level-level strategis. Dengan peningkatan jumlah perempuan yang memegang jabatan strategis baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, maka keputusan-keputusan yang diambil akan lebih berkontribusi bagi kemajuan kondisi sosial anak dan perempuan di ASEAN;

- Selain itu, WAIPA juga menghimbau negara-negara anggota AIPA untuk menjaga komitmen legislasi yang mendukung dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak di ASEAN, dengan merujuk pada pencapaian tujuan pembangunan milenium terkait penghidupan yang layak bagi perempuan dan anak-anak, dan pemberdayaan perempuan.

3. *Women Leadership in Southeast Asia (Res. 35GA/2014/WAIPA/03)*

- Para anggota WAIPA merekomendasikan kepada negara-negara anggota AIPA untuk memberikan ruang bagi perempuan-perempuan di negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai cita-citanya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus bertanggung-jawab dalam melindungi hak-hak perempuan dalam setiap aspek sosial, ekonomi dan politik. Selain itu, korporasi dihimbau untuk mengakomodasi kebijakan pengarusutamaan gender;
- Anggota WAIPA mengajak keterlibatan berbagai stakeholder, seperti organisasi-organisasi perempuan, pemerintah dan sektor swasta, dalam upaya peningkatan kepemimpinan perempuan, pelatihan pemimpin-pemimpin perempuan, dan mendukung keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Sidang Umum ke-35 AIPA tanggal 15-19 September 2014 di Vientiane Capital, Lao PDR telah berjalan secara lancar dan produktif dengan semangat persahabatan, persatuan dan kerjasama. Delegasi RI telah terlibat secara aktif dan konstruktif dalam setiap pertemuan.
2. Kontribusi Delegasi RI pada rangkaian SIUM antara lain terlihat dari diterimanya usulan draft resolusi Indonesia pada Sidang WAIPA. Delegasi RI juga telah memberikan berbagai masukan konstruktif terhadap draft resolusi yang dibahas pada masing-masing Sidang.
3. Dalam pembahasan *Joint Communiqué*, terjadi perdebatan cukup panjang karena Viet Nam ingin memasukkan lagi paragraf mengenai Laut Tiongkok Selatan secara utuh sebagaimana dimuat dalam resolusi Komite Politik. Setelah terjadi perdebatan akhirnya disepakati bahwa butir *political matters* pada *Joint Communiqué* merujuk pada *report of the AIPA-ASEAN* pada KTT ke-24 di Myanmar, 11 Mei 2014.

B. SARAN

1. Hasil Sidang Umum ke-35 AIPA berupa resolusi-resolusi di bidang WAIPA, Politik, Ekonomi, Sosial dan Organisasi memerlukan tindak lanjut implementasi dari masing-masing parlemen dan pemerintah negara-negara anggota AIPA
2. Dalam rangka implementasi resolusi-resolusi tersebut, maka DPR RI melalui komisi-komisi agar segera mengkomunikasikan hasil Sidang Umum ke-35 AIPA ke kementerian yang menjadi *counterpart*-nya
3. DPR RI diharapkan untuk meningkatkan kontribusinya di AIPA dengan menyumbangkan ide-ide baru terutama dalam pembentukan mekanisme implementasi efektif resolusi-resolusi yang dihasilkan AIPA
4. Mengingat hasil keputusan Sidang Executive Committee terhadap usulan Draft Resolusi Indonesia pada bidang Politik yaitu *The Adoption of National Action Plans to Implement the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and Reaffirm the State's Duty to Protect*, yang diusulkan untuk dibahas di Sidang Umum ke-36 AIPA di Malaysia, disarankan agar setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Sidang Umum AIPA ke-36 yang akan datang, Indonesia sudah mengirimkan usulan draft rancangan resolusi tersebut, baik kepada tuan rumah, Malaysia, maupun kepada Sekretariat AIPA dan seluruh AIPA *National Secretariats* sehingga dapat menjadi salah satu agenda item pembahasan Sidang Umum ke-36 AIPA
5. Mengingat Sekretariat AIPA bertempat di Gedung DPR RI, untuk anggota BKSAP periode DPR RI 2014 – 2019 disarankan meminta briefing dari Sekretaris Jenderal AIPA tentang isu-isu yang berkembang di AIPA untuk dapat dicermati dan disikapi dengan tepat

IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 14 (tiga belas) Anggota, serta Pejabat dan Staf Sekretariat Jenderal DPR RI (Sekretaris Delegasi), Tenaga Ahli, Penterjemah, dan wartawan, adalah Rp 1.086.233.859,-

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

- *Report of the Executive Committee Meeting*
- *Report of the 35th AIPA General Assembly*

- *Report of Dialogue with Observers*
- *Report of Committee on Joint Communiqué*
- *Joint Communiqué*
- *Resolutions*
- *Instrument of Transfer of Office of President AIPA*
- Dokumentasi Foto

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-35 AIPA yang berlangsung pada tanggal 14 – 20 September 2014 di Vientiane Capital, Lao PDR. Dokumen terkait akan dijadikan lampiran. Atas nama delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada delegasi untuk melaksanakan tugas berat yang mulia demi bangsa dan negara Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, September 2014

Ketua Delegasi

Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM
Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang/
A-384